

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, W. P. (2017). Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia. *Journal of International Relations Volume 3 Nomor 4*, 21-31.
- Agusalim, L., Sulistiyowati, & Amalia, S. N. (2023). *Gender dan Pembangunan Ekonomi: Studi Lintas Provinsi di Indonesia*. Bogor: Madza Media.
- Ainal Mardhiah, S. M. (2025). FEMISIDA DALAM KERANGKA HUKUM INDONESIA. *Pengadilan Tinggi Banda Aceh*.
- Anggraeni, E. J. (2023). ANALISIS PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TERHADAP FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, 118-126.
- Annur, C. M. (2023, Agustus 12). *Proporsi Penduduk Perempuan di Asia Tenggara (2022*. Diambil kembali dari databoks.katadata: <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/7fc554908fe403f/indonesia-masuk-5-besar-negara-dengan-proporsi-perempuan-terbesar-di-asia-tenggara-2022>
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2024). PERILAKU DISKRIMINATIF PADA PEREMPUAN AKIBAT KUATNYA BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONFLIK. *JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK*.
- Arifin, S. (2018). Kesetaraan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal DPR RI*, 27-41.
- Arifin, Y. (2024). Politik Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal Untidar Literasi Hukum*, 45-52.
- Asy'ari. (2022). Relasi Kuasa dan Tantangan Kekerasan Terhadap Perempuan di Perguruan Tinggi Islam. *Palita: Journal of Social Religion Research*.
- Aziz, A. A. (2018). Analisis Kepatuhan Terhadap Politik Lingkungan Internasional Clean Development Mechanism (CDM) dalam Protokol Kyoto: Studi Kasus Amerika Serikat dan Jepang. *Skripsi*.
- BPHN. (2007). *LAPORAN PENGKAJIAN HUKUM TENTANG OPTIONAL PROTOCOL CEDAW TERHADAP HUKUM NASIONAL YANG BERDAMPAK PADA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN*. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM.
- BPK RI. (2021). *Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2021*. Diambil kembali dari peraturan.bpk.go.id:

- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/192550/pergub-prov-jawa-tengah-no-21-tahun-2021>
- BPK RI. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021*. Diambil kembali dari [peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/188450/permendikbud-no-30-tahun-2021](https://peraturan.bpk.go.id/Details/188450/permendikbud-no-30-tahun-2021)
- BPK RI. (2021). *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2021*. Diambil kembali dari [peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/165693/perpres-no-25-tahun-2021](https://peraturan.bpk.go.id/Details/165693/perpres-no-25-tahun-2021)
- BPK RI. (2022). *Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2022*. Diambil kembali dari [peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/245898/pergub-prov-kepulauan-riau-no-55-tahun-2022](https://peraturan.bpk.go.id/Details/245898/pergub-prov-kepulauan-riau-no-55-tahun-2022)
- BPK RI. (2022). *Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022*. Diambil kembali dari [peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022](https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022)
- BPK RI. (2023). *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2023*. Diambil kembali dari [peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/240598/perpres-no-7-tahun-2023](https://peraturan.bpk.go.id/Details/240598/perpres-no-7-tahun-2023)
- BPK RI. (2023). *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Diambil kembali dari [peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023](https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023)
- BPK RI. (t.thn.). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Diambil kembali dari [peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004](https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004)
- Chayes, A. C. (1993). On Compliance. *International Organization Vol. 47*, 175-205.
- Databoks. (2021, December 14). *Databoks*. Diambil kembali dari Ketimpangan Gender Indonesia Tertinggi di ASEAN, Singapura Terendah: <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/06b0526f46bbfb0/ketimpangan-gender-indonesia-tertinggi-di-asean-singapura-terendah>
- Dewi, A. P. (2025, Agustus 19). *Komnas: Penting integrasi data dokumentasi kasus kekerasan perempuan*. Diambil kembali dari [antaranews.com: https://www.antaraneews.com/berita/5049665/komnas-penting-integrasi-data-dokumentasi-kasus-kekerasan-perempuan](https://www.antaraneews.com/berita/5049665/komnas-penting-integrasi-data-dokumentasi-kasus-kekerasan-perempuan)
- DP3A Banjarmasin. (2023, Desember 12). *Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Banjarmasin Tahun 2023*. Diambil kembali dari [dpppa.banjarmasinkota.go.id: https://dpppa.banjarmasinkota.go.id/2023/12/kampanye-16-hari-anti-kekerasan.html](https://dpppa.banjarmasinkota.go.id/2023/12/kampanye-16-hari-anti-kekerasan.html)

- DP3AP DIY. (2024, April 30). *Pelatihan Sistem Pencatatan & Pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) Melalui Aplikasi Simfoni PPA*. Diambil kembali dari dp3ap.jogjaprovo.go.id:https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/blog/Pelatihan-Sistem-Pencatatan-%26-Pelaporan-Kekerasan-terhadap-Perempuan-dan-Anak-%28KtPA%29-Melalui-Aplikasi-Simfoni-PPA
- Fauzia, R. (2022). SEJARAH PERJUANGAN PEREMPUAN INDONESIA MENGUPAYAKAN KESETARAAN DALAM TEORI FEMINISME. *Journal of Comprehensive Science*.
- FISIPOL UGM. (2021, Oktober 30). *Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, FISIPOL Crisis Center, dan Ruang Aman bagi Para Mahasiswa Magang*. Diambil kembali dari fisipol.ugm.ac.id:https://fisipol.ugm.ac.id/permendikbud-nomor-30-tahun-2021-fisipol-crisis-center-dan-ruang-aman-bagi-para-mahasiswa-magang
- Frishka, S. (2025, Juli 25). Wawancara Komisioner Komnas Perempuan. (N. A. Pinasti, Pewawancara)
- Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The Enforcement of Restorative Justice in Indonesia Criminal Law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Harahap, D. (2024, Agustus 22). *Kemen PPPA Refleksikan 5 Tahun Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dalam Kebencanaan*. Diambil kembali dari mediaindonesia.com:https://mediaindonesia.com/humaniora/694951/kemen-pppa-refleksikan-5-tahun-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-berbasis-gender-dalam-kebencanaan
- Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*.
- Holmes, R., & Bhuvanendra, D. (2014). Preventing and responding to gender-based violence in humanitarian crises. *Humanitarian Practice Network*.
- ICJ. (2023, September). *Indonesia: Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and Online Gender Based Violence Against Women*. Diambil kembali dari [icj.org:https://www.icj.org/wp-content/uploads/2023/09/Briefing-Paper-on-OGBV_ENG.pdf](https://www.icj.org:https://www.icj.org/wp-content/uploads/2023/09/Briefing-Paper-on-OGBV_ENG.pdf)
- Indonesia for Humanity. (2021). *About Pundi Perempuan*. Diambil kembali dari indonesiauntukkemanusiaan.org:https://indonesiauntukkemanusiaan.org/pundi-perempuan/
- Intan, N. W. (2024). Deconstructing Meaning Article 14 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium*.
- Jakarta Feminist. (2021). *Situasi Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia selama Pandemi Covid-19*. Jakarta: Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta.

- James, K., Meyering, B., Braaf, & Breckenridge, J. (2014). Responding to Domestic Violence in the Wake of Disasters: Exploring the Effects on Services and Workers. Dalam *Issues of Gender and Sexual Orientation in Humanitarian Emergencies* (hal. 114-126). Springer.
- Kemdiktisaintek. (2023, Agustus 9). *Apa saja yang terkandung dalam Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023*. Diambil kembali dari dev-itjen.kemdiktisaintek.go.id: <https://dev-itjen.kemdiktisaintek.go.id/apa-saja-yang-terkandung-dalam-permendikbudristek-no-46-tahun-2023/>
- Kemen KOINFRA. (2023, Januari 4). *UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Diambil kembali dari jdih.kemenkoinfra.go.id: <https://jdih.kemenkoinfra.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>
- Kemen PANRB. (2021, Desember 24). *Pemerintah Alokasikan DAK Nonfisik untuk Perlindungan Perempuan dan Anak*. Diambil kembali dari menpan.go.id: <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pemerintah-alokasikan-dak-nonfisik-untuk-perlindungan-perempuan-dan-anak#:~:text=Sejak%20tahun%202021%20ini%2C%20kita%20menam%20satu,untuk%20dana%20pelayanan%20perlindungan%20perempuan%20dan%20a>
- Kemen PPPA. (2018, April 19). *Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018*. Diambil kembali dari [jdih.kemenpppa.go.id: https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/245](https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/245)
- Kemen PPPA. (2020, Desember 17). *IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM KETENAGAKERJAAN (Peraturan Menteri PPPA No. 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja)*. Diambil kembali dari <https://industriallindah.com/wp-content/uploads/2021/01/rp3-new.pdf>
- Kemen PPPA. (2020, Desember 30). *Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020*. Diambil kembali dari [jdih.kemenpppa.go.id: https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-pppa-nomor-13-tahun-2020](https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-pppa-nomor-13-tahun-2020)
- Kemen PPPA. (2021, Desember 31). *Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021*. Diambil kembali dari [jdih.kemenpppa.go.id: https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/465](https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/465)
- Kemen PPPA. (2021, Juli 19). *Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021*. Diambil kembali dari [jdih.kemenpppa.go.id: https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-pppa-nomor-5-tahun-2021](https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-pppa-nomor-5-tahun-2021)
- Kemen PPPA. (2022, Desember 27). *Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022*. Diambil kembali dari [jdih.kemenpppa.go.id:](https://jdih.kemenpppa.go.id)

- <https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-10-tahun-2022>
- Kemen PPPA. (2022, Desember 27). *Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2022*. Diambil kembali dari [jdih.kemenpppa.go.id: https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-11-tahun-2022](https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-11-tahun-2022)
- Kemen PPPA. (2022, Desember 28). *Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022*. Diambil kembali dari [jdih.kemenpppa.go.id: https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-12-tahun-2022](https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-12-tahun-2022)
- Kemen PPPA. (2022, Januari 20). *Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022*. Diambil kembali dari [jdih.kemenpppa.go.id: https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-pppa-nomor-2-tahun-2022](https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-pppa-nomor-2-tahun-2022)
- Kemen PPPA. (2022, Juni 17). *Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022*. Diambil kembali dari [jdih.kemenpppa.go.id: https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/permen-pppa-nomor-7-tahun-2022](https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/permen-pppa-nomor-7-tahun-2022)
- Kemen PPPA. (2022, Desember 12). *Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2022*. Diambil kembali dari [jdih.kemenpppa.go.id: https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/575](https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/575)
- Kemen PPPA. (2023, Februari 22). *Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023*. Diambil kembali dari [jdih.kemenpppa.go.id: https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/Peraturan-Menteri-PPPA-Nomor-3-Tahun-2023-NSPK-Penyelenggaraan-Urusan-Pemerintahan-Konkuren-Bidang-PPPA](https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/Peraturan-Menteri-PPPA-Nomor-3-Tahun-2023-NSPK-Penyelenggaraan-Urusan-Pemerintahan-Konkuren-Bidang-PPPA)
- Kemen PPPA. (2023, Maret 28). *Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023*. Diambil kembali dari [jdih.kemenpppa.go.id: https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-4-tahun-2023](https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-4-tahun-2023)
- Kemen PPPA. (2023, November 16). *Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2023*. Diambil kembali dari [jdih.kemenpppa.go.id: https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-6-tahun-2023](https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-6-tahun-2023)
- Kemen PPPA. (2023, Desember 29). *Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2023*. Diambil kembali dari [jdih.kemenpppa.go.id: https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-8-tahun-2023](https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-8-tahun-2023)
- Kemen PPPA. (2024, Agustus 13). *Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan Luncurkan Laporan Sinergi Data Kekerasan Terhadap*

- Perempuan*. Diambil kembali dari kemenpppa.go.id: <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-komnas-perempuan-dan-forum-pengada-layanan-luncurkan-laporan-sinergi-data-kekerasan-terhadap-perempuan>
- Kemen PPPA. (2024, November 15). *Komitmen Kemen PPPA dan UNFPA dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender*. Diambil kembali dari kemenpppa.go.id: <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/commitment-kemen-pppa-dan-unfpa-dalam-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-berbasis-gender>
- Kemko PMK. (2021, Juli 10). *Lindungi Perempuan, Pemerintah Perkuat SPPT PKKTP*. Diambil kembali dari kemkopmk.go.id: <https://www.kemenkopmk.go.id/lindungi-perempuan-pemerintah-perkuat-sppt-pkkt>
- Keohane, R. O. (1982). The Demand for International Regimes. *International Organization*, 325.
- Koalisi Perempuan Indonesia. (2018, December 11). *koalisiperempuan*. Diambil kembali dari KETIMPANGAN GENDER DI INDONESIA TETAP TINGGI: <https://www.koalisiperempuan.or.id/2018/12/11/ketimpangan-gender-di-indonesia-tetap-tinggi/>
- KOMNAS PEREMPUAN. (2017, Juli 24). *Siaran Pers Komnas Perempuan : Catatan Komnas Perempuan 33 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia*. Diambil kembali dari komnasperempuan.go.id: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>
- Komnas Perempuan. (2021, April 22). *Siaran Pers Komnas Perempuan "Memperkuat Koordinasi dan Kerja Sinergis Para Pemangku Kepentingan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) di Kabupaten Sikka" (Maumere, 22 April 2021)*. Diambil kembali dari komnasperempuan.go.id: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperkuat-koordinasi-dan-kerja-sinergis-para-pemangku-kepentingan-dalam-sistem-peradilan-pidana-terpadu-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sppt-pkkt-di-kabupaten-si>
- Komnas Perempuan. (2021, Oktober 25). *Siaran Pers Komnas Perempuan PERTEMUAN NASIONAL KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT PKKTP), 21-22 Oktober 2021 (25 Oktober 2021)*. Diambil kembali dari komnasperempuan.go.id: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peremuan-nasional-koordinasi-penyelenggaraan-sistem-peradilan-pidana-terpadu-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sppt-pkkt-21-22-oktober-2021>

perempuan-pertemuan-nasional-koordinasi-penyelenggaraan-sistem-peradilan-pidana-terpadu-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sppt-pkktp-21-22-oktober-2021-25-oktober-2021

Komnas Perempuan. (2022). *CATAHU 2022 : CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. (2022, 11 Desember). *Kampanye #16HAKTP*. Diambil kembali dari [instagram.com: https://www.instagram.com/p/CmBEh1hyrat/?igsh=anIyaHZveWs1cm4z](https://www.instagram.com/p/CmBEh1hyrat/?igsh=anIyaHZveWs1cm4z)

Komnas Perempuan. (2022, November 2025). *Kampanye 16 HAKTP*. Diambil kembali dari [instagram.com: https://www.instagram.com/p/CIYTKkGyzAq/?igsh=MTM1azlmMWZpZzU1ZQ%3D%3D](https://www.instagram.com/p/CIYTKkGyzAq/?igsh=MTM1azlmMWZpZzU1ZQ%3D%3D)

Komnas Perempuan. (2022, Agustus 30). *Pembentukan Satgas PPKS di Kampus*. Diambil kembali dari [instagram.com: https://www.instagram.com/p/Ch334TirlDR/?igsh=cmg0aDUyNzZrbHZ3](https://www.instagram.com/p/Ch334TirlDR/?igsh=cmg0aDUyNzZrbHZ3)

Komnas Perempuan. (2022, April 12). *Pengesahan RUU TPKS: Pastikan Implementasi Terobosandalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta Pemulihan Korban Kekerasan Seksual*. Diambil kembali dari [komnasperempuan.go.id: https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/penge-sahan-ruu-tpks](https://komnasperempuan.go.id)

Komnas Perempuan. (2023, Agustus 29). *Finalisasi Draft Standard Setting KBK di Lingkungan BUMN*. Diambil kembali dari [komnasperempuan.go.id: https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/finalisasi-draft-standard-setting-kbk-di-lingkungan-bumn](https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/finalisasi-draft-standard-setting-kbk-di-lingkungan-bumn)

Komnas Perempuan. (2023, Februari 8). *Komnas Perempuan bersama @lbhapik.jakarta dan @jenteralawschool*. Diambil kembali dari [instagram.com: https://www.instagram.com/p/CoZNB6OPsoL/?igsh=MWl4eDRsZHBzaTJyYQ%3D%3D](https://www.instagram.com/p/CoZNB6OPsoL/?igsh=MWl4eDRsZHBzaTJyYQ%3D%3D)

Komnas Perempuan. (2023, Oktober 6). *Kuliah Umum Pembukaan Pelatihan Penghapusan Kekerasan Seksual Bagi Aparat Penegak Hukum, Pengada Layanan, dan Pendamping*. Diambil kembali dari [komnasperempuan.go.id: https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/kuliah-umum-pembukaan-pelatihan-penghapusan-kekerasan-seksual-bagi-aparat-penegak-hukum-pengada-layanan-dan-pendamping](https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/kuliah-umum-pembukaan-pelatihan-penghapusan-kekerasan-seksual-bagi-aparat-penegak-hukum-pengada-layanan-dan-pendamping)

Komnas Perempuan. (2023, Mei 2). *Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Pendidikan Nasional: Komitmen Ciptakan Kawasan Bebas Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Meningkatkan Signifikan*. Diambil kembali dari komnasperempuan.go.id:

- <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-pendidikan-nasional-komitmen-ciptakan-kawasan-bebas-kekerasan-di-lingkungan-pendidikan-meningkat-signifikan>
- Komnas Perempuan. (2024). *CATAHU 2023: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- KOMNAS PEREMPUAN. (2024). *CATAHU 2023: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2023*. Jakarta.
- KOMNAS PEREMPUAN. (2024). *KAJIAN 21 TAHUN CATATAN TAHUNAN KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2001-2021*. Jakarta.
- Komnas Perempuan. (2024, Agustus 3). *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan*. Diambil kembali dari komnasperempuan.go.id: <https://komnasperempuan.go.id/ Pernyataan-sikap-detail/ Pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan>
- Komnas Perempuan. (2025). *CATAHU 2024: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2024*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2025, Februari 25). *Pemantauan Implementasi Program Kawasan Bebas Kekerasan*. Diambil kembali dari komnasperempuan.go.id: <https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/pemantauan-implementasi-program-kawasan-bebas-kekerasan>
- Komnas Perempuan. (2025, Januari 2). *Sejarah Komnas Perempuan*. Diambil kembali dari komnasperempuan.go.id: <https://komnasperempuan.go.id/halaman/sejarah-komnas-perempuan#:~:text=Komnas%20Perempuan%20didirikan%20berdasarkan%20Keputusan,dan%20pemajuan%20hak%20asasi%20perempuan>
- Komnas Perempuan. (2025, Juli 24). *Siaran Pers Komnas Perempuan Refleksi 41 Tahun Ratifikasi CEDAW dalam Kebijakan Nasional*. Diambil kembali dari komnasperempuan.go.id: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-refleksi-41-tahun-ratifikasi-cedaw-dalam-kebijakan-nasional>
- Kondurora, O., Sutadji, & Apriani, F. (2020). LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK “CITRA TEPIAN” KOTA SAMARINDA. *Jurnal Administrative Reform*.
- Konsil LSM. (t.thn.). *Yayasan Cahaya Perempuan – Women Crisis Center (Profil Lembaga)*. Diambil kembali dari konsillsm.or.id: <https://konsillsm.or.id/cahayaperempuan/>

- Krasner, S. D. (1982). Structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables. *International Organization*, 185-205.
- Lapor SAPA 129. (2025). Diambil kembali dari <https://laporsapa129.kemenpppa.go.id/>
- Maharani, N. P. (2024). Analysis of Victim Blaming Culture in Indonesia. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, 2798-2812.
- Miles, E. L., Andresen, S., Carlin, E. M., Skaerseth, J. B., & Arild Underdal, J. W. (2001). *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*. London: The MIT Press.
- Mitchell, R. B. (2007). Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law. *Oxford Handbook of International Environmental Law*, 893-921.
- Mufarida, B. (2019, Juli 30). *Kementerian PPPA Ungkap 409.178 Perempuan Telah Alami Kekerasan*. Diambil kembali dari nasional.sindonews: <https://nasional.sindonews.com/berita/1425142/13/kementerian-pppa-ungkap-409178-perempuan-telah-alami-kekerasan>
- Nursyafia, Amirulloh, M., & Muchtar, H. N. (2023). Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Game Online Menurut Hukum di Indonesia Serta Perbandingan dengan Negara Lain. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2045-2056.
- OHCHR. (n.d.). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979*. Diambil kembali dari [ohchr.org: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women](https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women)
- Pane, O. O., Sihombing, S., Simbolon, D., Zalukhu, D., & Lumbantobing, R. (2024). KESETARAAN GENDER. *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 299.
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya. *Jurnal Sasi Vol. 16 No.3*.
- Pemkot Ambon. (2022, September 15). *Pemkot Optimalkan P2TP2A Jadi Rumah Aman Korban Kekerasan Perempuan dan Anak*. Diambil kembali dari [ambon.go.id: https://ambon.go.id/pemkot-optimalkan-p2tp2a-jadi-rumah-aman-korban-kekerasan-perempuan-dan-anak/](https://ambon.go.id/pemkot-optimalkan-p2tp2a-jadi-rumah-aman-korban-kekerasan-perempuan-dan-anak/)
- Pokharel, S. (2008). Gender Discrimination: Women Perspectives. *Nepalese Journal of Development and Rural Studies*, 5 (2): 80-87.
- Puchala, D. J., & Hopkins, R. F. (1982). International regimes: lessons from inductive analysis. *International Organization*, 245-275.
- Rey, Y. (2022, May 24). *carilayanan.com*. Diambil kembali dari Persimpangan Identitas Sosial: Diskriminasi Berlapis dalam Kekerasan Berbasis Gender:

- <https://carilayanan.com/persimpangan-identitas-sosial-diskriminasi-berlapis-dalam-kekerasan-berbasis-gender/>
- Reydinata, R. (2025). UN Women's Role in Addressing Gender-based Violence in Indonesia during the Covid-19 Pandemic: Norm Entrepreneur Analysis . *JLAST (Journal of Law and Social Transformation)* .
- Saputra, C. A. (2024, Desember 14). *Jumlah Women Crisis Center Menurun Saat Kekerasan Perempuan Marak*. Diambil kembali dari beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/nasional/2860471/jumlah-women-crisis-center-menurun-saat-kekerasan-perempuan-marak>
- Sari, W. (2024, April 18). *Layanan Hotline Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan - SAPA 129*. Diambil kembali dari atmago.com: https://www.atmago.com/berita-warga/layanan-hotline-penanganan-kekerasan-terhadap-perempuan-sapa-129_e6454611-0750-4268-b6a3-23e6684fa672
- Saryono. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Dalam Saryono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Alfabeta Bandung.
- Save the Children. (2025, Agustus 20). *Peluncuran Website SAPA 129 di Malam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak*. Diambil kembali dari savethechildren.or.id: <https://savethechildren.or.id/artikel/peluncuran-website-sapa-129>
- Sekda Prov Aceh. (2023). *jdih.acehprov.go.id*. Diambil kembali dari Dokumen dan Informasi Hukum: Pergub Aceh Nomor 57 Tahun 2023: <https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/5e7762fa-4e03-4f4b-8997-f3a72dc8e3c0>
- Septianty, R. (2025). PENGARUH DAYA TARIK KONTEN EDUKASI KEKERASAN SEKSUAL MELALUI INSTAGRAM @_PEREMPUAN_ TERHADAP KESADARAN FOLLOWERS TENTANG KEKERASAN SEKSUAL. *Skripsi Universitas Nasional*.
- Setiawan, E. (2019). Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik. *Yinyang Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*.
- Shastri, A. (2014). Gender Inequality and Women Discrimination. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*.
- Šimonović, D. (2008, December). *Audiovisual Library of International Law*. Diambil kembali dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: <https://legal.un.org/avl/ha/cedaw/cedaw.html>
- Siregar, H. (2015). Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 14 (1), 10-18.

- Suardi. (2016). IMPLIKASI SOSIAL DISKRIMINASI GENDER(STUDI TENTANG GENDER DI KAMPUNG BUNGUNG KATAMMUNG KABUPATEN BANTAENG). *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1(1), 41-45.
- Sugiyono, P. D. (2013). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R & D. Dalam P. D. Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R & D* (hal. 224). Bandung: PENERBIT ALFABETA BANDUNG.
- Sugiyono, P. D. (2013). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. Dalam P. D. Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (hal. 225). Bandung: PENERBIT ALFABETA BANDUNG.
- Sumirat, I. R. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3 (01), 19-30.
- Susianawati, R. (2024, 12 4). *16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Momentum Perkuat Sinergi Semua Pihak Cegah Kekerasan terhadap Perempuan*. Diambil kembali dari kemenpppa.go.id: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-momentum-perkuat-sinergi-semua-pihak-cegah-kekerasan-terhadap-perempuan>
- Syarief, I. S. (2025, Agustus 25). *Cara Melaporkan Kekerasan ke SAPA 129, Bantuan Gratis dan Bersifat Rahasia*. Diambil kembali dari suarasurabaya.net: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/cara-melaporkan-kekerasan-ke-sapa-129-bantuan-gratis-dan-bersifat-rahasia/>
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1998). *Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource (3rd ed.)*. John Wiley & Sons Inc.
- Thea, A. (2022, Desember 13). *10 Catatan Komnas Perempuan terhadap Materi KUHP Baru*. Diambil kembali dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/10-catatan-komnas-perempuan-terhadap-materi-kuhp-baru-lt63980e781e16c/>
- Triyantoro, A., & Zuwanda, Z. S. (2024). The Role of Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes in Handling Cases of Gender Based Violence in Indonesia . *West Science Law and Human Rights*, 412-420.
- UN Women. (2014). *Women's Rights to Equality: The Promise of CEDAW*. n.p.: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women).
- UN Women. (2022, April 12). *The United Nations in Indonesia welcomes the Indonesian Parliament's approval of the Sexual Violence Crime Bill (RUU*

- TPKS) into law on 12 April 2022.* Diambil kembali dari [asiapacific.unwomen.org](https://asiapacific.unwomen.org/en/stories/press-release/2022/04/the-indonesian-parliaments-approval-of-the-sexual-violence-crime-bill):
<https://asiapacific.unwomen.org/en/stories/press-release/2022/04/the-indonesian-parliaments-approval-of-the-sexual-violence-crime-bill>
- UNDP Indonesia. (2022, July 19). *Optimization of M&E Mechanism for Indonesia's Hospital-based Integrated Service Center for GBV Victims.* Diambil kembali dari [undp.org](https://www.undp.org/policy-centre/seoul/news/optimization-me-mechanism-indonesias-hospital-based-integrated-service-center-gbv-victims): <https://www.undp.org/policy-centre/seoul/news/optimization-me-mechanism-indonesias-hospital-based-integrated-service-center-gbv-victims>
- UNDP Indonesia. (2024, March 12). *Investing in GBV Service, Protecting Women's Right for Equality.* Diambil kembali dari [undp.org](https://www.undp.org/indonesia/blog/investing-gbv-service-protecting-womens-right-equality): <https://www.undp.org/indonesia/blog/investing-gbv-service-protecting-womens-right-equality>
- UNDP Indonesia. (t.thn.). *Gender Equality and Social Inclusion.* Diambil kembali dari [undp.org](https://www.undp.org/indonesia/gender): <https://www.undp.org/indonesia/gender>
- UNFPA. (2023). *PIHAK: Indonesian Woman Living Without Violence.* Diambil kembali dari [indonesia.unfpa.org](https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2025-07/PIHAK%20Booklet_EN.pdf): https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2025-07/PIHAK%20Booklet_EN.pdf
- UNFPA. (2024, August 20). *Ministry of Women's Empowerment and Child Protection and UNFPA: Reflecting on 5 Years of Preventing and Addressing Gender-Based Violence in Disasters on World Humanitarian Day 2024.* Diambil kembali dari [indonesia.unfpa.org](https://indonesia.unfpa.org/en/news/ministry-womens-empowerment-and-child-protection-and-unfpa-reflecting-5-years-preventing-and): <https://indonesia.unfpa.org/en/news/ministry-womens-empowerment-and-child-protection-and-unfpa-reflecting-5-years-preventing-and>
- UNHR. (2021, November 24). *CEDAW/C/IDN/CO/8: Concluding observations on the eight periodic report of Indonesia.* Diambil kembali dari [ohchr.org](https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/cedawcidnco8-concluding-observations-eighth-periodic-report): <https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/cedawcidnco8-concluding-observations-eighth-periodic-report>
- UNTC. (n.d.). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.* Diambil kembali dari [treaties.un.org](https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-8&chapter=4&clang=_en): https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-8&chapter=4&clang=_en
- Verania. (2024, November 15). *Komitmen Kemen PPPA dan UNFPA dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender.* Diambil kembali dari [kemenpppa.go.id](https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/komitmen-kemen-pppa-dan-unfpa-dalam-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-berbasis-gender): <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/komitmen-kemen-pppa-dan-unfpa-dalam-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-berbasis-gender>

- WCC Jombang. (t.thn.). *Layanan WCC Jombang*. Diambil kembali dari [wccjombang.org: https://www.wccjombang.org/2012/11/layanan.html](https://www.wccjombang.org/2012/11/layanan.html)
- WCC Svy Amira. (t.thn.). *About WCC Savy Amira*. Diambil kembali dari [savyamirawcc.com: https://savyamirawcc.com/tentang-kami/siapa-kami](https://savyamirawcc.com/tentang-kami/siapa-kami)
- WHO. (2023, November 9). *A novel approach to ending violence against women in Indonesia: The RESPECT framework*. Diambil kembali dari [who.int: https://www.who.int/indonesia/news/detail/09-11-2023-a-novel-approach-to-ending-violence-against-women-in-indonesia--the-respect-framework](https://www.who.int/indonesia/news/detail/09-11-2023-a-novel-approach-to-ending-violence-against-women-in-indonesia--the-respect-framework)
- Wuri, D. K., & Muslimah, F. (2024). Model Kampanye Anti Kekerasan Seksual di Media Sosial Instagram oleh SAFEnet. *Relations: Journal of Media Studies and Public Relations*, 127-153.
- Yusalia, H. (2014). PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM TANTANGAN BUDAYA PATRIARKI. *WARDAH*.